M. ZEN GOMO DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI PADA DEKADE I REFORMASI DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata I (S1) Pada Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh

RIZKI ILAHI

1201699/2012

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti Korupsi pada Dekade I Reformasi di Sumatera Barat
Nama	: Rizki Ilahi
Bp/Nim	: 1201699/ 2012
Program studi	: Pendidikan Sejarah
Jurusan	: Sejarah
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Mestika Zed, MA	Dr. Erniwati, S.S, M.Hum
NIP. 195509191982031003	NIP. 197104061998022001

Ketua Jurusan Sejarah

Dr. Erniwati, S.S, M.Hum
NIP. 197104061998022001

Scanned by CamScanner

Halaman Pengesahan Lulus Ujian Skripsi

Dinyatakan Lulus setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 4 Agustus 2016

"M. ZEN GOMO DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI PADA DEKADE I REFORMASI DI SUMATERA BARAT"

Nama	: Rizki Ilahi
TM/NIM	: 2012/ 1201699
Program Studi	: Pendidikan Sejarah
Jurusan	: Sejarah
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dr. Mestika Zed, MA	1.
Sekretaris	: Dr. Erniwati, S.S, M.Hum	2.
Anggota	: 1. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum	3.
	2. Hendra Naldi, S.S, M.Hum	4.
	3. Drs. Etmi Hardi, M.Hum	5.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rizki Ilahi
NIM/BP	: 1201699/2012
Program Studi	: Pendidikan Sejarah
Jurusan	: Sejarah
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti Korupsi pada Dekade I Reformasi di Sumatera Barat**", adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Sejarah

Dr. Erniwati, S.S, M.Hum
NIP. 197104061998022001

Yang menyatakan

Rizki Ilahi
NIM. 1201699

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Rizki Ilahi. 1201699/2012. M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti Korupsi pada Dekade I Reformasi di Sumatera Barat. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2016.

Skripsi ini merupakan kajian biografi tematis yang membahas tentang M. Zen Gomo selama bergabung di dunia politik. fokusnya kajian ini ialah memaparkan dan menganalisis tindakan yang ia lakukan dalam gerakan anti-korupsi pada era reformasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah memberikan gambaran tentang aktivitas politik M. Zen Gomo serta tempatnya dalam gerakan anti korupsi di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap. yaitu : *tahap pertama* heuristik, ialah mengumpulkan data dari sumber lisan dan tulisan. Data ini diperoleh melalui studi arsip yang diperoleh dari lemabaga maupun milik pribadi, studi pustaka dan wawancara bersama orang-orang yang berhubungan dengan tokoh dan gerakan anti korupsi yang ia lakukan. *Tahap kedua* kritik sumber baik internal dan eksternal. *Tahap ketiga* ialah analisis dan interpretasi terhadap data. *Tahap keempat* ialah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yaitu skripsi. Di samping itu, penelitian ini juga memakai metode penelitian biografi. Tahapan dalam metode tersebut ialah (1) mengemukakan pentingnya tokoh untuk diteliti,(2) menggali serangkaian pengalaman objektif dari kehidupan tokoh, (3) mencari data yang relevan dengan tokoh dan zamannya, (4) analisis data, (5) eksplorasi makna, dan (6) melakukan generalisasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa M. Zen Gomo bergabung dengan dunia politik sejak berakhirnya Orde Baru dan berdirinya Partai Amanat Nasional. Selama di dunia politik dan menjadi anggota DPRD, ia sering dihadapkan dengan berbagai masalah yang bertentangan dengan nuraninya sehingga ia melakukan penolakan. Mulai dari menolak untuk menerima uang "*money politik*"dalam pemilihan gubernur tahun 2000, menolak menerima uang "tak terduga" dari eksekutif, puncak dari tindakannya ialah menuntut agar APBD sumbar tahun 2002 direvisi oleh rekan-rekannya. Tindakan yang ia lakukan tersebut juga mendapat sokongan dari masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Sumatera Barat, sehingga pada tahun 2004, sebanyak 43 anggota DPRD Sumbar ditetapkan sebagai tersangka.

Kata kunci: Biografi, Reformasi, Gerakan Anti Korupsi

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta iradatnya sehingga memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti Korupsi pada Dekade I Era Reformasi di Sumatera Barat**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan rintangan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Untuk itu sudah sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr Mestika Zed, M.A selaku pembimbing I (pertama) dan Ibu Dr. Erniwati M.Hum selaku pembimbing II (kedua) yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, Bapak Hendra Naldi, S.S, M.Hum dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku tim penguji yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Drs. M. Zen Gomo beserta dengan keluarga besar yang telah mengizinkan dan bersedia membantu penulis mendapatkan serta memberikan dokumen-dokumen yang penting untuk penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Erniwati M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah, Bapak Dr. Ofianto, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Sejarah dan segenap karyawan dan karyawati Jurusan Sejarah.

5. Keluarga besar tercinta yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Nilma Ayu Putri, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Lembaga Bantuan Hukum Padang yang telah memberikan arsip/dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

8. Anggota Forum Peduli Sumatera Barat Prof. Mestika Zed, Bapak Oktavianus Rizwa, Bapak Zenwen Pador, Bapak Rumazar Ruzuar, Prof. Elwi Danil, dan Prof. Saldi Isra yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancara.

9. Staf dan Mantan Anggota DPRD Sumatera Barat Bapak Ulil Amran, Bapak Zamhar Baheram, Bapak Mahardi Efendi, dan Bapak Alfian yang telah bersedia memberikan data dan meluangkan waktu untuk diwawancara.

10. Kader Muhammadiyah dan PAN, Prof. Dasman Lanin, Bapak Maigus Nasir, Bapak Taslim, Bapak Diki Rizwa dan Bapak Inoki yang telah bersedia memberikan waktunya untuk diwawancara.

11. Pensee 12, serta seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Sejarah, keluarga besar HMI Komisariat Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dan semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan demi menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembaca dan dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut bagi mahasiswa Jurusan Sejarah khususnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan menjadi amal saleh serta mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Padang, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Tinjauan Pustaka 6

1. Kerangka Konseptual 6

2. Kajian Terdahulu 12

E. Metode Penelitian 15

BAB II LINGKUNGAN KELUARGA DAN KARIER

A. Kelahiran dan Masa Kecil 21

B. Pendidikan 25

C. Karier Profesional dan Idealisme 30

BAB III KEGIATAN POLITIK DAN GERAKAN ANTI KORUPSI

A. Memasuki Dunia Politik 37

B. Menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat 44

C. M. Zen Gomo dan FPSB 59

D. Mundur di DPRD sampai Keluar dari Partai 75

BAB IV POSISI M. ZEN GOMO DAN EPILOG GERAKAN

A. Peran M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti Korupsi 84

B. Epilog Gerakan Anti Korupsi di Sumatera Barat..... 91

BAB IV KESIMPULAN..... 96

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.

A. Hasil Penghitungan Suara Pemilu 1999 di Sumatera Barat 43

B. Komisi C DPRD Sumatera Barat 1999-2004 49

C. Panitia Anggaran DPRD Sumatera Barat 1999-2004 50

D. Hasil Penjaringan Surat Dukungan terhadap Bakal Calon (Balon) ketua DPW PAN Sumbar tahun 2005 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap zaman yang baru memiliki tantangan tersediri, dan pada saat yang sama juga melahirkan tokoh sesuai dengan *zeitgeist* atau jiwa zamannya. Reformasi 1998 merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia kontemporer. Sebagai zaman yang baru, reformasi memiliki tokoh pendukung dan penentang dalam mewujudkannya. Pada dasarnya reformasi 1998 merupakan upaya dari rakyat Indonesia untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dan pembenahan terhadap pemerintahan yang dipandang telah bobrok. Salah satu agenda dari gerakan reformasi tersebut ialah pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.[1]

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN tersebut, muncul berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya ialah gerakan anti-korupsi. Banyak kalangan atau tokoh terutama pejuang reformasi yang menjadi pendukungnya. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, politisi, dan kelompok masyarakat lainnya. Tokoh-tokoh tersebut muncul baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah seorang tokoh gerakan anti-korupsi yang muncul di daerah ialah M. Zen

[1] Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Gomo. Seorang politisi yang kurang dikenal di awal karir politiknya, tetapi kemudian namanya mencuat ketika muncul isu korupsi di DPRD Sumatera Barat.

M. Zen Gomo merupakan politisi dari Sumatera Barat. Ia mulai bergabung di dunia politik setelah berakhirnya Orde Baru, tepatnya setelah Partai Amanat Nasional dideklarasikan. Melalui partai yang lahir dari semangat Reformasi inilah, Zen memulai karirnya di dunia politik Sumatera Barat.[2] Pada saat menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat, ia melakukan otokritik, dengan meminta agar APBD Sumbar tahun 2002 direvisi, karena bertentangan dengan peraturan yang ada, hingga akhirnya memilih berhenti dari DPRD. Kasus ini merupakan satu-satunya yang terjadi di Indonesia.[3]

Penelitian ini mengkaji tentang biografi M. Zen Gomo. Tokoh politik baru bergabung di dunia politik setelah berakhirnya rezim Orde Baru, namun cukup berperan, terutama pada awal masa reformasi di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena upaya yang ia lakukan dalam mewujudkan salah satu cita-cita reformasi yaitu semangat anti-Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).[4]

Ada beberapa hal yang mengesankan dan menarik untuk dipelajari tentang tokoh ini, *Pertama,* melihat peranan yang dilakukan M. Zen Gomo dalam melakukan otokritik terhadap kebijakan DPRD yang menurutnya berpaling dari cita-cita reformasi. Terlihat dari upaya yang dilakukan oleh anggota dewan

[2] *Wawancara* M. Zen Gomo, Padang, 10 April 2016.

[3] Saldi Isra, *Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi: Sebuah Kumpulan Wawancara,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hlm 44.

[4] Terdapat enam tuntutan mahasiswa yang menjadi tujuan Reformasi dengan agenda yaitu (1) turunkan dan adili Soeharto, (2) Otonomi daerah seluas-luasnya, (3) cabut Dwi Fungsi ABRI, (4) tolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (5) penegakkan supremasi hukum (6) pengusutan pelanggaran HAM.

Sumatera Barat dalam meningkatkan pos anggaran yang menguntungkan kas pribadi anggota dewan.[5] Dia merupakan anggota DPRD atau orang dalam yang menentang kebijakan anggaran tersebut dengan melakukan mogok kerja karena tuntutan yang ia sampaikan tidak direspon oleh rekan-rekannya.

Pada saat yang sama, beberapa daerah di Indonesia juga mengalami kasus serupa. Seperti dugaan mark-up bagi-bagi uang oleh legislatif kepada anggota DPRD Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) masing-masing Rp 75 juta, di Riau sebanyak 55 anggota DPRD yang menerima suap sebesar Rp 2,5 milyar dari Gubernur Riau Saleh Djasit,[6] dan kontroversi sekitar uang *kadeudeuh* yang terjadi di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengakali mata anggaran untuk menambah pendapatan pribadi.[7] Secara umum, kasus-kasus tersebut mendapat protes dari masyarakat luas, dan pada beberapa kasus juga mendapat penolakan dari dalam

[5] Setelah dikeluarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kebebasan daerah dalam mengatur anggaran rumah tangganya sendiri, mengakibatkan DPRD setiap daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur anggarannya. Dampaknya, anggaran tersebut cenderung menguntungkan kas pribadi anggota dewan dengan banyaknya pos anggaran untuk DPRD dan sulit dibantah hampir semua anggota DPRD menjadi orang kaya baru (OKB). Setelah dikeluarkannya PP no 110 tahun 2000 yang memberikan batasan wewenang anggota DPRD (sebagai penyusun anggaran) dalam menetapkan anggaran terutama untuk pos anggaran dewan tidaklah mengubah kebijakan yang buat anggota DPRD dalam penetapan APBD tahun 2002. Bahkan di Sumatera Barat terjadi upaya untuk membatalkan PP 110 tersebut namun ditolak pada bulan agustus 2001 dan baru pada 9 September 2002, PP 110 tersebut dibatalkan. Lihat Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, (jakarta: Kompas, 2009), hlm 30-33; *Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 1999 s/d 2004*, hlm 74-75; Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil: Petite Histori Indonesia Jilid I*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm 85.

[6] Sebenarnya terdapat beberapa lagi kasus yang terjadi pada anggota dewan, baik tinggkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Dari 20 daftar wilayah anggota DPRD yang bermasalah hanya tiga kasus yang tidak membicarakan tentang korupsi. Lengkapnya lihat "Peta DPRD Bermasalah". *Forum Keadilan.* No. 3, 25 Mei 2003, hlm 30-31.

[7] Dadang Tri Sasongko dkk (Ed), *Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta:Mitra, 2006), hlm: 134-135.

lembaga tersebut. Namun yang berani melakukan protes serta dilanjutkan dengan mogok kerja salah seorangnya ialah oleh M. Zen Gomo.[8]

Kedua, otokritik yang dilakukan M. Zen Gomo serta dilanjutkan dengan mogok kerja memberi peluang bagi gerakan masyarakat sipil untuk lebih mudah mengungkap kasus tersebut. Ia juga ikut serta dalam Forum Peduli Sumatera Barat – kelompok diskusi dan gerakan, yang bertujuan untuk mengungkap korupsi di Sumatera Barat – sampai ditetapkan sebanyak 43 orang anggota DPRD Sumbar sebagai tersangka. Sehingga gerakan tersebut mengilhami daerah lain untuk mengungkap kasus yang sama.

Ketiga M. Zen Gomo merupakan anggota DPRD yang berani mundur dari kursi jabatan karena menolak kebijakan lembaganya yang dianggap telah menyimpang.[9] Tindakan M. Zen Gomo tersebut merupakan satu-satunya kasus yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menjadi contoh dan mengilhami politisi serta generasi muda yang ingin bergabung di dunia politik untuk konsisten dengan semangat anti-korupsi tersebut.

Pentingnya penelitian ini untuk dilakukan ialah karena pada masa itu, di tengah semangat reformasi yang menjadi arah baru Indonesia, dalam saat yang sama juga terjadi distorsi kebudayaan (pengaburan hukum, nilai-nilai dan sebagainya) di tengah masyarakat. Sehingga dengan berlakunya otonomi daerah,

---

[8] Febrianti, "Seorang Anggota DPRD Sumatera Barat Mogok Kerja", https://m.tempo.co/read/news/2002/05/22/05811061/seorang-anggota-dprd-sumatera-barat-mogok-kerja diakses pada 5 April 2016.

[9] Pada tanggal 17 Februari 2003, M. Zen Gomo mengajukan surat pengunduran diri ke Menteri Dalam Negeri dan pada 16 Juni 2003, Surat Keputusan Pemberhentian M. Zen Gomo dikeluarkan. Lihat M. Zen Gomo, "hari-hari kelabu di DPRD Sumatera Barat", *Catatan Pribadi* (Padang: 2004) hlm 16.

banyak muncul kasus-kasus korupsi di daerah-daerah yang dilakukan oleh penguasa dengan memanfaatkan hukum dan kekuasaan yang ada. Tindakan M. Zen Gomo muncul sebagai sikap yang berbeda dari kasus tersebut.

Sejauh ini belum ada penelitian yang menulis tentang M. Zen Gomo. Baik dalam penulisan buku ataupun penelitian ilmiah yang mengkaji tentang upaya beliau dan kiprahnya selama bergabung di dunia politik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh upaya M. Zen Gomo dalam menjaga konsistensinya serta posisi M. Zen Gomo dalam gerakan anti-korupsi di Sumatera Barat. Maka penulis mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti-Korupsi pada Dekade I Reformasi di Sumatera Barat.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan biografi tematis tentang kegiatan M. Zen Gomo selama bergabung di dunia politik dan upaya-upaya yang ia lakukan dalam mewujudkan semangat anti-korupsi pada dekade pertama era reformasi di Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah ialah

1. Bagaimana aktifitas politik M. Zen Gomo dalam gerakan anti-korupsi pada era reformasi di Sumatera Barat?
2. Di mana tempat M. Zen Gomo dalam gerakan anti-korupsi era reformasi di Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Menggambarkan aktivitas politik M. Zen Gomo dalam gerakan anti-korupsi era reformasi di Sumatera Barat.
2. Menggambarkan peran dan posisi penting M. Zen Gomo dalam gerakan anti-korupsi di Sumatera Barat.

Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua macam yaitu manfaat akademis dan praktis.

1. Manfaatnya secara akademis ialah untuk memperkaya literatur yang mengkaji tentang biografi politik dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan biografi lainnya.
2. Manfaat secara praktis ialah memberikan gambaran bagi pembaca secara umum dan khususnya kepada generasi muda dan politisi terkait dengan nilai ketauladanan yang bisa diambil dari tokoh.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Konseptual

a. Biografi

Menurut Taufik Abdullah biografi ialah suatu bentuk penulisan sejarah yang mencoba menangkap dan menguraikan jalan hidup seseorang dalam

hubungan lingkungan sosial-historis yang mengintarinya.[10] Menurut kuntowidjoyo, biografi adalah catatan tentang hidup seseorang, meskipun sangat mikro, namun menjadi bagian dalam mosaik sejarah yang lebih besar.[11] Maksudnya dengan memahami biografi, kita juga dapat memahami zaman yang menjadi latar belakang biografi dan lingkungan sosial politiknya.

Menurut Lerissia, idealnya suatu biografi harus mengandung tiga unsur, yaitu (1) ungkapan perwatakan tokoh, (2) rentetan tindakan tokoh, (3) keadaan zaman tokoh.[12] Sementara lebih dipertegas oleh Kuntowijoyo bahwa seharusnya dalam biografi mengandung empat hal, yaitu (1) kepribadian tokoh, (2) kekuatan sosial, (3) Lukisan Sjarah Zaman serta (4) keberuntungan dan kesempatan yang datang.[13] Dengan demikian, akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang tokoh yang ingin diangkat sebagai objek penelitian.

Sehubungan dengan kepribadian tokoh, sebuah biografi perlu memperhatikan adanya pengaruh latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial budaya dan perkembangan diri. Juga penting diceritakan pengalaman-pengalaman unik yang membawa membawa perubahan terhadap tokoh,[14] sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan mengantarkan pembaca untuk memahami karakter tokoh lebih dalam.

---

[10] Taufik Abdullah et al, *Manusia dalam Kemelut Sejarah,* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm: 6.

[11] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), Hlm: 203.

[12] R. Z. Lerissia. "Segi-segi Praktis Penulisan Biografi Tokoh". *Historia* (Jurnal Mahasiswa Sejarah Fakultas Sastra, UI, Jakarta) Nomor 1 September 1985.

[13] Kuntowujoyo *Op Cit*., hlm 206.

[14] *Ibid.*, hlm 207.

Mengenai keadaan zaman tokoh, penelitian ini juga akan melihat bagaimana lingkungan membentuk karakter tokoh baik semasa kecil bahkan ketika bergabung dalam dunia politik. Pada masa kecil M. Zen Gomo dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan kegiatan partai politik, dan juga merupakan anggota organisasi Muhammadiyah. kedekatan tersebut juga memberikan pengaruh kepadanya untuk memilih bergabung ke dalam kegiatan politik walaupun telah berumur. Ditambah lagi euforia reformasi yang dibawa oleh partai. Selain itu juga akan melihat lingkungan sekitar tempat M. Zen Gomo beriteraksi dalam membentuk ketokohannya.

Untuk menjelaskan perjalanan hidup seorang tokoh tersebut, menurut Kuntowijoyo dalam penelitan biografi, setidaknya terdapat dua pendekatan, yaitu (1) *portrayal* (portrait) dan (2) *scientific* (ilmiah), masing – masing mempunyai metodologi sendiri. Biografi portrayal bila hanya bisa memahami. Sedangkan biografi scientific, berusaha menerangkan tokoh berdasarkan analisis ilmiah. juga penggunaan konsep dan teori psikoanalisis serta menghasilkan apa yang disebut dengan sejarah kejiwaan.[15] Karya ini dalam penelitiannya berusaha menggunakan pendekatan biografi *scientific* (ilmiah).

Penulisan biografi M. Zen Gomo dikategorikan sebagai biografi tematis tidak melihat perjalanan hidup M. Zen Gomo secara menyeluruh, tetapi fokus pada tema-tema tertentu. Penulis menekankan pada perjalanan hidup M. Zen Gomo, sejak ia mulai bergabung di partai politik, menjadi pengurus di Partai Amanat Nasional, menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, mundur dari kursi

[15] *Ibid*., hlm 208-209.

DPRD, sampai memutuskan untuk meninggalkan kegiatan politik. Untuk melihat perkembangan kepribadian tokoh, dapat kita amati dalam gambar berikut.

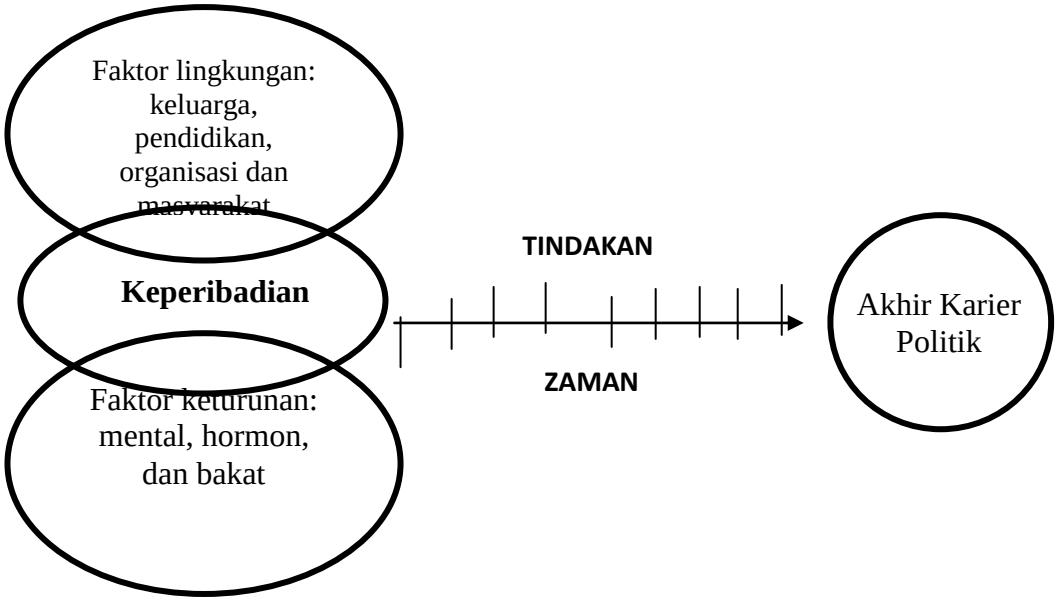

Gambar 1.1 Pola pembentuk kepribadian seseorang. [16]

Dalam pembentukan kepribadian seseorang, ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Secara umum, terdapat dua faktor penentu yaitu faktor lingkungan dan faktor gen atau keturunan. Faktor lingkungan tersebut diantaranya keluarga, merupakan lingkungan yang paling awal dalam membentuk kepribadian seseorang. sebagai seorang yang hidup di dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, Zen juga memegang erat nilai-nilai agama yang dianutnya. Lingkungan

[16] Diramu dari berbagai sumber. lihat Marco Del Giudice and Jay Belsky "The Development of Life History Strategies: Toward a Multi-Stage Theory", dalam David M. Buss, Patricia H. Hawley (eds.), *The Evolution of Personality and Individual Differences*, (Offord, and New York: Oxford University Press, 2011). hlm 498; Wardianto, "H. Darwis Taram dt Tumangguang: Bupati pada Masa Krisis (PDRI dan PRRI)", *Skripsi*, (Padang: FIS UNP, 2007), hlm 12.

masyarakat sekitar Zen, terutama pada saat ia masih kecil di Rambatan, masyarakat di lingkungannya juga merupakan penganut agama yang kuat. Aktif dalam organisasi dan partai politik yang berideologi agama Islam yaitu Muhammadiyah dan Masyumi. Sementara, untuk pendidikan selain pendidikan agama yang ia dapat di lingkungan keluarga, Zen juga menyelesaikan studinya hingga menjadi sarjana administrasi. Ini lebih memberikan dampak terhadap karir profesional dan politik M. Zen Gomo kelak.

Sementara mengenai faktor keturunan, diantaranya hormon, bakat dan mental setidaknya memberikan gamabaran tentang Zen, bahwa secara umum mental M. Zen Gomo, memang tidak sekeras para pejuang lainnya. Dalam perkembangannya menunjukkan bahwa Zen cenderung kalah oleh zaman. Ini tampak dalam setiap memperjuangkan apa yang ideal menurut pemahaman yang ia anut, Zen cenderung terpojokkan dan pada akhirnya memilih untuk mundur dari perlawanan tersebut.

b. Reformasi dan Gerakan Anti Korupsi

Reformasi merupakan suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan ditata secara

sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*Good Govermance*).[17]

Reformasi di Indonesia ditandai dengan tubangnya rezim orde baru yang bersifat diktator, dan sehingga pada saat yang sama Indonesia juga mengalami masa transisi ke demokrasi (demokratisasi).[18] Selain itu juga dikuatkan dengan keluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sederhananya, Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 juga memberikan pengaruh terhadap demokratisasi di Indonesia serta upaya untuk membersihkan dari korupsi. Sehingga dengan semangat tersebut juga memunculkan kelompok-kelompok yang berperan untuk mengawal terlaksananya Reformasi dan demokratisasi di Indonesia misalnya LSM, dll. Salah satu bentuk dari upaya tersebut ialah munculnya gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi tertentu.

c. Civil Society

Civil Society atau Masyarakat sipil adalah salah satu dari tiga sektor penting dalam masyarakat bersama-sama dengan pemerintahan dan bisnis sebagai salah satu unsur terpenting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Secara

[17] Rumzi Samin, "Reformasi Birokrasi", *jurnal Fisip UMRAH* (Vol. 2, No. 2, 2011), hlm 172.

[18] Internationa IDEA, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, (Stockholm: International IDEA, 2000), hlm 14.

hakikatnya masyarakat sipil merupakan pilar demokrasi, dan ruang publik untuk dapat melakukan aktifitas politik sosial secara independen terhadap negara.

Menurut Thomas Hobbes dan John Locke merumuskan masyarakat sipil sebagai suatu abstraksi atas kondisi masyarakat yang dihadapkan dengan konsepsi negara alam. suatu kondisi yang diperkirakan, kehidupan manusia mengejar kepentigannya masing-masing. Dalam kondisi seperti itu, dikhawatirkan akan terjadi perperangan yang akibatnya akan membahayakan hak-hak fundamental individu. Selanjutnya untuk mengatasi para individu tersebut menyerahkan kebebasan alamiah mereka dan sepakat untuk memasuki masyarakat yang terikat aturan. Sederhananya, masyarakat sipil ialah masyarakat yang beradab. Sementara menurut Locke masyarakat sipil merupakan bagian dari peradaban, yang berada diluar kendali pemerintah dan pasar, terpinggirkan oleh keduanya. Locke juga melihat pentingnya pergerakan sosial masyarakat yang mampu dilakukan oleh kelompok sipil untuk melindungi publik dari kepentingan komersial dan pemerintah.[19]

2. Kajian Terdahulu

Karya yang dijadikan kajian terdahulu dalam penelitian ini ialah buku karya Gusti Asnan yang berjudul *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Dalam karya ini dijelaskan tentang pemerintahan di Sumatera Barat

[19] Andi Widjayanto, dkk, *Transnasional Masyarakat Sipil, (*Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm 4-5.

pada masa Reformasi. Salah satu sub bagiannya ialah mengenai kasus yang terjadi di DPRD Sumatera Barat. Pada awalnya tidakan dan kebijakan dewan tersebut sejalan dengan kepentingan rakyat, namun dalam perkembangannya karena DPRD mendapat kewenangan yang besar dalam mengatur anggaran. Hal ini mengakibatkan munculnya anggaran yang menguntungkan kas pribadi sebagian besar anggota dewan. Berlanjut pada protes yang dilakukan oleh M. Zen Gomo dari internal Dewan dan masyarakat dari luar yang tergabung dalam Forum Peduli Sumatera Barat yang berujung dengan diajukannya 43 anggota dewan ke pengadilan.[20] Penjelasan dari karya Gusti Asnan tersebut sangat membantu memberikan gambaran tentang pemerintahan Sumatera Barat di awal Reformasi, Terutama tentang kasus yang terjadi di DPRD, dan peran M. Zen Gomo. Pemaparannya masih bersifat umum, juga tidak terlalu membahas tentang tokoh-tokoh yang memainkan peranan disana, begitu juga tentang upaya-upaya M. Zen Gomo dalam mengungkap kasus tersebut.

Skripsi Febri Nanda, yang berjudul *Struktur Peluang Politik Keberhasilan Forum Peduli Sumatera Barat dalam Mengungkapkan Kasus Korupsi di DPRD Sumatera Barat Tahun 2002.* Menganalisis tentang gerakan yang dilakukan FPSB dalam mengadvokasi dana APBD Sumatera Barat. Selain itu ia juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan FPSB dalam mengungkap kasus korupsi di DPRD Sumatera Barat tahun 2002. Juga dideskripsikan peran M. Zen Gomo sebagai salah satu faktor pendorong keberhasilan FPSB tersebut. Hal ini dipandang sebagai dampak dari pecahnya

[20] Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi,* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm 239-251.

kelompok elit lokal Sumatera Barat. Sehingga ada anggota dewan yang menolak penyusunan anggaran dan membuka kasus tersebut ke publik.[21] Skripsi tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan meggunakan pendekatan ilmu politik, dan bahasan tentang peranan dan posisi M. Zen Gomo masih belum begitu tampak di sana.

Skripsi Wardianto yang berjudul *H. Darwis Taram dt Tumangguang: Bupati pada Masa Krisis (PDRI dan PRRI)* menceritakan tentang kiprah seorang bupati di Sumatera Barat, pada masa PDRI dan PRRI. Menggambarkan tentang pengaruh dan konstribusi tokoh tersebut dalam membawa serta menyesuaikan diri dengan semangat zamannya.[22] Skripsi ini merupakan kajian biografi tematis yang membahas tentang biografi politik, sama halnya dengan kajian yang peneliti lakukan.

Selain itu, skripsi Zikril Hakim yang berjudul *Harun Yunus: Aktivis Politik Lintas Zaman Dari PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) Sumatera Barat"(1932-1973).* Skripsi ini menggambarkan tentang aktivitas seorang tokoh politik Islam di tingkat lokal, yang mengalami pasang surut dalam karir politiknya terutama paska munculnya kebijakan fusi partai yang dikeluarkan oleh penguasa Orde Baru. Akhirnya, ia lebih memilih untuk mundur dalam kegiatan politik praktis namun tetap berjuang dalam lembaga-lembaga keagamaan di Sumatera

[21] Febri Nanda, "Struktur Peluang Politik Keberhasilan Forum Peduli Sumatera Barat dalam Mengungkapkan Kasus Korupsi di DPRD Sumatera Barat Tahun 2002", *Skripsi* (Padang: FISIP UNAND, 2011)

[22] Wardianto, *Op. Cit.,*

Barat salah satunya MUI Sumbar.[23] Skripsi ini juga merupakan kajian biografi tematis, yang mengkaji tentang kehidupan tokoh selama bergabung di dunia politik. Penelitian tersebut masih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat umum.

Sumbangan karya sebelumnya terhadap peneliti ialah dapat dijadikan sebagai rujukan data terutama terkait dengan pemerintahan dan gerakan anti korupsi yang terjadi di Sumatera Barat pada masa reformasi, serta dijadikan sebagai rujukan dalam studi tokoh. Perbedaan antara skripsi yang peneliti tulis dengan karya terdahulu ialah, bahwa penelitian ini merupakan kajian biografi tematis yang mengkaji perjalanan hidup M. Zen Gomo selama bergabung di dunia politik, khususnya dalam gerakan anti korupsi di Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Biografi adalah sebuah "genre" khusus dari studi sejarah. Studi biografi juga mengikuti alur atau tahapan metode penelitian sejarah secara umum, yaitu (1) Tahapan heuristik, yaitu kegiatan mencari atau mengumpulkan sumber, informasi dan jejak masa lalu. (2) Tahapan kritik sumber, (3) Tahapan interpretasi dan terakhir (4) tahapan historiografi (penulisan),[24]

Heuristik merupakan sebuah proses pencarian dan pengumpulan sumber atau data yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Louis Gottchalk ada dua hal penting yang harus diperhatikan seorang peneliti pada tahap heuristik ini,

[23] Zikril Hakim, "Harun Yunus: Aktivitas Politik Lintas Zaman dari PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) Sumatera Barat". *Skripsi*. (Padang: FIS UNP, 2016)

[24] Louis Gottschalk., *Mengerti Sejarah*,. (Jakarta:UI Press.1975), hlm 32.

yaitu (1) pemilihan subjek; dan (2) informasi tentang subjek. Proses pemilihan subjek mengacu pada empat pertanyaan pokok, yaitu di mana (aspek geografis), siapa (aspek biografis), kapan (aspek kronologis), dan bagaimana (aspek fungsional atau okupasional). Melalui empat pertanyaan pokok ini, penelitian sejarah akan lebih terfokus dan terarah.[25]

Pengumpulan data ini berasal dari dua sumber, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu studi perpustakaan, diantaranya dapat dilakukan di perpustakaan UNP, Perpusatakaan FH UNAND, Perpustakaan FISIP UNAND, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan tempat lain yang memungkikan untuk mendapat sumber tersebut. selain itu, arsip penulis dapatkan melalui DPRD Sumatera Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, DPW PAN Sumbar, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumbar, dan arsip pribadi baik yang dimiliki M. Zen Gomo, maupun orang-orang di sekitarnya. Arsip tersebut dapat berupa catatan pribadi, ijazah, sertifikat, piagam, Surat Keputusan (SK), foto-foto, memori DPRD Sumatera Barat tahun 1999-2004, data-data dari surat kabar baik lokal maupun nasional serta dokumen-dokumen lainya.

Untuk memperoleh sumber lisan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara langsung dengan tokoh yang bersangkutan, keluarga dan orang-orang di sekitarnya, baik yang mendukung tindakannya maupun yang bertentangan. Diantaranya rekan sesama anggota DPRD Sumatera Barat tahun 1999-2004, teman sesama anggota Partai PAN Sumatera Barat sezamana, rekan

[25] *Ibid*, hlm 32.

sesama pengurus BMT Taqwa dan Organsiasi Muhammadiyah Sumatera Barat, politisi yang sezaman, serta anggota Forum Peduli Sumatera Barat (tokoh gerakan anti-korupsi sezaman), dll.

Data lisan dikumpulkan melalui metode sejarah lisan yaitu wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti harus memastikan informan yang diwawancarai tidak keberatan jika proses wawancara tersebut direkam. Selain itu pada saat proses wawancara peneliti harus mampu membedakan antara pandangan informan (*emic)*, dan fakta apa adanya yang mesti diolah sehingga menjadi pandangan peneliti (*etic)*. [26] Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara peneliti harus memastikan informan benar-benar mengetahui kejadian tersebut dan bertanggung jawab atas informasi yang diberikan.[27]

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa sumber benda, sumber tertulis, maupun sumber lisan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat ekstern ataupun intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan otentisitas sumber. Peneliti dapat bertanya dan mengecek otentisitas sumber tersebut. Adapun kritik intern diperlukan untuk menilai tingkat kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada isi dan informasi yang terdapat dalam sumber tertulis serta kemampuan sumber lisan untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah.

---

[26] Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 64-65.

[27] A. Adaby Darban, "Sejarah Lisan Memburu Sumber Sejarah dari Pelaku dan Penyaksi Sejarah", *Humaniora* (Vol. IV, 1997) hlm 1.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu berupa analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) fakta-fakta sejarah. Hal ini penulis lakukan agar fakta-fakta yang tampaknya terlepas antara satu sama lain bisa menjadi satu hubungan yang saling berkaitan. Dengan demikian, interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai fakta-fakta sejarah.

Setelah melakukan proses analisis dan sintesis, proses kerja mencapai tahap akhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Proses penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang sebelumnya terlepas satu sama lain dapat disatukan sehingga menjadi satu perpaduan yang logis dan sistematis dalam bentuk narasi kronologis.

Selain tetap menggunakan pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah, peneliti juga menggabungkan dengan dimensi spesifik dari metode biografi itu sendiri, tetapi masih terdapat keterkaitan dalam pelaksanannya. Tahapan-tahapan dalam metode biografi yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Menulis tentang subjek yang akan diteliti dan mengemukakan pentingnya M. Zen Gomo tersebut untuk diteliti.

2. Mulai menggali lebih dekat serangkaian pengalaman objektif dari kehidupan tokoh yang akan diteliti. Contohnya menggali tentang masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya atau berdasarkan penagalaman unik yang dialaminya.

3. Mencari dan menggali data-data yang relevan dengan tokoh atau zamannya, baik dengan wawancara langsung bersama tokoh (jika masih

hidup) atau melalui informan yang kenal dekat dengannya, serta data-data yang diperoleh dari sumber arsip/dokumen.

4. Menganalisis data yang telah diperoleh dan mengidentifikasi peristiwa dn pengalaman-pengalaman penting, unik serta khas dari tokoh. Analisis data tersebut dapat dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut.

a. Membuat dan mengatur data yang telah dikumpulkan berdasarkan "heading" atau tema-tema terkait dengan kehidupan tokoh.

b. Menggali pernyataan faktual dari sumber yang tersedia, termasuk interpretasi atau penilaian murni dari sudut pandang tokoh.

c. Mendeskripsikan kronologi fakta-fakta tentang kehidupan tokoh sejalan dengan "siklus kehidupan" yang ia lewati.

d. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kisah hidup serta menentukan "titik balik" si tokoh.

e. Menyusun analisis secara sistematis pokok persoalan dengan memperhatikan butir-butir berikut.

    1) Mengidentifikasi konteks lingkungan dan jika perlu dibantu dengan gagasan teoritis (lihat Gambar 1.1) dan menghubungkan dengan pola-pola makna yang mungkin dapat diterik dari pengalaman hidup si tokoh.

2) Mencari hubungan kausalitas dalam setiap fase-fase kehidupan tokoh, khusunya yang terkait dengan titik balik si tokoh.

3) Membuat generalisasi dalam bentuk kesimpulan dari butir satu dan dua di atas.

5. Melakukan eksplorasi makna dari data yang sudah diperoleh serta mencari keterangan, kejelasan dan arti lain yang mendekati.

6. Tahap akhir, peneliti mengaitkan arti yang diperoleh kepada struktur yang lebih besar guna menjelaskan arti yang diperoleh pada tahap sebelumnya.[28]

[28] Lihat Louis Smith dalam Denzim, Norman K & Yvonna S. Lincoln (Eds), *handbooks of Qualitative Research*, (London: Sage, 1994), hlm 286-303.